

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 43 – 49 Lamongan - Kode Pos 62216
Telp. (0322) 317794 - 317798, Fax. (0322) 321729 e-mail : setwan@lamongankab.go.id
web site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 000.7.26/27.1/KEP/413.050/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Koodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045;);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA :
Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama yang selanjutnya disebut P-Renja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran RKPD Kabupaten Lamongan Tahun

KETIGA :

2025;

KEEMPAT

: Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman penyusunan RKA Sekretariat Tahun 2025;

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
- BAB II. EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviuw terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program kegiatan masyarakat;
- BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV. PENUTUP

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 16 Juni 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 43 – 49 Lamongan - Kode Pos 62216
Telp. (0322) 317794 - 317798, Fax. (0322) 321729 e-mail : setwan@lamongankab.go.id
web site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 000.7.26/ 23.1 /KEP/413.050/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA
KERJA
(P-RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 perlu membentuk Tim Penyusun Renja dengan menetapkan dalam Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Koodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan);
 15. Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor: 050/195/413.204/2025, tanggal 12 Februari 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Susunan Tim Penyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 2 Juni 2025
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten
Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Anggota Panitia Pelaksana
dimaksud.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/ 23,1 /KEP/413.050/2025
Tanggal : 2 Juni 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	PUJO BROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Ketua	Dra. Ec. SUSIE MARLIANA, M.M	Kepala Bagian Program dan Keuangan
3.	Sekretaris	FARIES SYAIFUDIN, S.E	Kasubbag. Perencanaan dan Penganggaran
4.	Anggota	1. EKO MUDJO WIDODO, S.P., M.Agr	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		2. Drs. PURWO HANDIYONO, M.M	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Aspirasi
		3. USMAN, S.E., M.M	Kepala Bagian Umum
		4. ARIFUL, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		5. ENI ZULIATI, S.H., M.M	Kasubbag. Perbendaharaan dan Verifikasi
5.	Tim Teknis	1. A. ZAKKI MUBAROK, S.H	Staf
		2. YURIDA SEPTIAN A., S.Pd	Staf
		3. DWI ANZAINI SUSILOWATI, A.Md	Staf

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN



PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes

Kata Pengantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Lamongan, Juni 2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD s/d Tribulan I tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penalaah Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja-Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 ini merupakan tahun dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan menyusun Perubahan Rencana Kerja

Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (P-RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213) pengganti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 517);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
15. Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor: 050/195/413.204/2025, tanggal 12 Februari 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja berdasarkan ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

Sistematika Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan dengan Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tribulan I Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

PD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN

No.	Sasaran Renja	Kode	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi kinerja program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Tribulan I		Catatan/ Keterangan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat DPRD	100%	82,78%	100,00%		89%	100,00%	7,64%	
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dok. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	95,00%	100,00%	95%	100%	100,00%	0,00%	
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tepat waktu	40 Dokumen	8 Dok	8 Dok	8	100%	8 Dok	0	
			2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tercukupi	65 Dokumen	13 Dok	13 Dok	12	100%	13 Dok	0	
2	Meningkatnya manajemen Internal		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	9,00%	
	Perangkat Daerah		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 Orang/ 1 Tahun	22Orang/12 Bulan	12 Dok	18/12	100%	12 Dok	3	
			2 Pelaksanaan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	0	
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	0	
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD	30 Dokumen	13 Dokumen	13 Dok	13 Dok	100%	13 Dok	0	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pakaian dinas dan pelatihan Perangkat Daerah yang tercukupi	100%	100,00%	100,00%	100	49%	100,00%	11,00%	
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta kelengkapan	5 Kali	3 paket	1 paket	1 paket	100%	2 Stel	0	
			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pelatihan/ bimtek yang dilaksanakan	15	1 orang	10 Orang	-	-	55 Orang	6	
			3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kali	2 kali	56 orang	-	100%	0	0	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	88,00%	100,00%	88%	79%	100,00%	99,81%	
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8505 Alat Listrik	1699 Alat	12 paket	12 paket	98%	13 laporan	2 Paket	
			2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	28 Tabung/1 Tahun	69 Tabung	1 paket	1 paket	100%	3 kali	3 Paket	
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22280 ATK	2962 ATK	2 paket	2 paket	100%	14 paket	0	
			4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	300000 fotokopi dan 15700 cetakan	47658 Cetak	8 paket	8 paket	63%	8 paket	0	
			5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	375 Buku	30 Buku	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	
			6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8340 Kali	110 laporan	110 laporan	46 laporan	100%	46 laporan	7 laporan	
			7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Asdeski,105 kuniker, 70 perdin luar	30 Kali	35 laporan	29 laporan	97%	35 laporan	0	
			8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000 buah	100 Box	1 dokumen	0	100%	1 dokumen	0	

			9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sistem berbasis elektronik yang terlaksana	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	100,00%	100,00%	11,11%	100%	100,00%	0,00%	
				1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpenuhi		0,00%	-	-	100%	-	-	
				2 Pengadaan Mebel	jumlah Paket mebel yang disediakan	95 Unit	59 unit	28 Unit	-	100%	28 Unit	0	
				3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	45 Unit	79 Unit	8 Unit	4	100%	8 Unit	0	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Kantor yang tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	100%	98%	100,00%	21,00%	
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15030 lembar	2104 Imbar	4 Laporan	4 Laporan	93%	4 Laporan	0	
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Tahun	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 lapo	
				3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Tenaga Bupati, 29 Tenaga Administrasi, 2 Tenaga Pengamanan dan 4 Pengemudi/ 1 Tahun	2 Tenaga Bupati, 29 Tenaga Administrasi, 2 Tenaga Pengamanan dan 4 Pengemudi/12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 lapo	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	63,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	8,79%	
				1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit/1 Tahun	4 Unit/ 12 Kali	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	
				2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit/1 Tahun	23 Unit/ 12 Kali	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	11 Unit	
				3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	151 Unit/1 Tahun	244 Unit	157 Unit	157 Unit	100%	157 Unit	0	
				4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Lokasi/1 Tahun	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Daerah	Presentase Laporan Keuangan DPRD yang tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	94,12%	91%	100,00%	100,00%	
				1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/1 Tahun	50 Orang/ 12 Bulan	50 Orang/ 12 Bulan	12	100%	50 Orang/ 12 Bulan	50 Orang/3 Bulan	
				2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	20 Kali	(50 Orang x 3 stel)	(50 Orang x 4 stel)	4	100%	(50 Orang x 5 stel)	0	
				3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah Orang yang mengikuti Medical Check up DPRD	50 Orang/1 kali	1 kali	1 kali/ 50	0	72%	1 kali/ 50	0	
				Layanan Administrasi DPRD	Presentase Rapat-rapat DPRD yang terpenuhi	100%	97,97%	100,00%	76,47%	87%	100,00%	92,18%	
				1 Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah fasilitasi Fraksi DPRD yang terpenuhi	27930 ATK	2082 ATK	0	0	100%	0	1939 ATK	
				2 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jumlah lapran hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	335 Rapat	93 Rapat	68 laporan	52 laporan	74%	66 laporan	52 Rapat	
2.				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	100%	101,00%	100,00%	100%	66%	100,00%	101,23%	
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	75,00%	100,00%	4	65%	100,00%	60,38%	
				1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	150 Rapat	21 Rapat	30 dok	18 dok	57%	26 dok	19 Rapat	
				2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	75 Rapat	8 Rapat	12 dok	6 dok	67%	8 dok	5 Rapat	
				3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	jumlah kajian perundang-undangan yang terfasilitasi	25 Rapat	-	-	0	100%	-	-	
				4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah dokumen hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	40 NA	7 NA	7dok	3 dok	100%	4 dok	8 NA	

		5 Penyusunan Tata Tertib DPRD	jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	5 NA	-	1 dok	1 dok	0%	-	-	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase rapat-rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100%	61,00%	100,00%	100%	60%	100,00%	56,52%	
		1 Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah dok hasil pembahasan KUA dan PPAS	30 Rapat	3 Rapat	4 dok	4 dok	33%	5 dok	3 Rapat	
		2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dok hasil Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	30 Rapat	3 Rapat	4 dok	4 dok	67%	5 dok	1 Rapat	
		3 Pembahasan APBD	Jumlah dok. Hasil Pembahasan APBD	30 Rapat	5 Rapat	18 dok	18 dok	67%	8 dok	4 Rapat	
		4 Pembahasan APBD Perubahan	jumlah dok. Hasil Pembahasan APBD Perubahan	30 Rapat	3 Rapat	18 dok	18 dok	33%	8 dok	3 Rapat	
		5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah dok. Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	15 Rapat	6 Rapat	3 dok	3 dok	100%	3 dok	2 Rapat	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	16,00%	100,00%	10%	31%	100,00%	25,00%	
		1 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	100 Kali	4 Kali	10 lap	4 lap	20%	10 lap	-	
		2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100 Kali	-	10 lap	0	28%	10 lap	-	
		3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Kali	6 Kali	10 lap	0	28%	10 lap	5 kali	
		4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100 Kali	3 Kali	10 lap	0	48%	10 lap	7 Kali	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	100%	100,00%	100,00%	59,14%	83%	100,00%	99,71%	
		1 Orientasi DPRD	Jumlah Dok. Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 kali	0,00%	1 dok	1 dokumen		1 dok		
		2 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dok. Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25 Kali	6 Kali	35 dok	16 dokumen	100%	35 dok	6 Kali	
		3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah dok. Publikasi dan Dokumentasi DPRD	132000 Surat Kabar	26400 lembar	12 dok	12 dok	100%	12 dok	26.400 Koran	
		4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang/1 Tahun	16 Jam	10 orang	0	40%	10 orang	5 Jam	
		5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang/1 Tahun	7 Orang /12 Bulan	7 Orang /12 Bulan	12 dokumen	100%	7 Orang /12 Bulan	7 Orang /12 Bulan	
		6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	jumlah dok. Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	110 demo/audiensi	18 Kali	22 dok	13 dok	59%	22 Kali	12 Kali	
		7 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dok	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	jumlah dok pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	15 Kali	3 Kali	2 Kali	2 kali	100%	2 Kali	3 Kali	
		2 Pelaksanaan Reses	jumlah dok. Hasil Pelaksanaan Reses	15 Kali	3 Kali	2 Kali	2 kali	100%	2 Kali	3 Kali	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Presentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	100%	0,00%	100%	0,00%	5,0%	100%	-	
		1 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan Tata Beracara DPRD	5 NA	-			0%		-	
		2 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	50 Rapat	-	2 Rapat	0	10%	2 Rapat	-	
		Pembahasan Kerjasama Daerah	Presentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	jumlah dok Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	21100 Ekslemplar	4220 ekslemplar	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4220 Ekslemplar	
		Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase Fasilitasi Tugas DPRD dilaksanakan	100%	86,61%	100%	93%	86%	100%	90%	
		1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah dok Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	270 kali	75 Kali	56 dok	56 dok	100%	80 dok	46 Kali	
		2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD yang disusun	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dok	1 dok	-	1 Dok	1 Dok	

			3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	jumlah dok. Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	240 Rapat	24 Rapat	26 Rapat	26 Rapat	58%	26 Rapat	19 Rapat	
			4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jumlah dok. Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	115 Kali	10 Kali	31 dok	31 dok	100%	70 dok	35 Kali	

Lamongan, Juni 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN



PUJOBROTO IRIAWAN P. S.E., M.M., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Kegiatan Tahun 2024

Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2024 sejumlah Rp. 74.204.333.671,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan 2 Program, 17 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan, Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 64.143.839.310,00 (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah), capaian fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 86,44%, hal ini dikarenakan Perencanaan yang mengacu pada tingginya harga barang belanjaan, harga sewa pada saat itu, akan tetapi pada realisasinya terdapat penurunan harga, diskon harga karena volume pemesanan, pembelian dan persewaan dilakukan secara kolektif, hal

itulah yang menyebabkan sisa anggaran. Hal itu yang menjadi alasan adanya Penghematan Anggaran sehingga anggaran yang disediakan tidak semuanya terserap.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 beserta strategi pencapaiannya dirinci untuk kelancaran tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dari APBD Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini dalam rangka memberikan dukungan pelayanan administrasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam pelayanan yang administratif dan teknis melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagaimana Terlampir :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Sangat diperlukan SDM/ pegawai yang mumpuni, berdedikasi, dan berkualitas, sehingga dalam pelaksanaaa dilapangan tidak ditemukan kendala/masalah dalam memberikan pelayanan terhadap anggota DPRD.
- Perlunya dilakukan diklat/bintek/workshop dan pelatihan baik Formal maupun Non Formal untuk meningkatkan SDM Sekretariat DPRD

dengan dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Daerah guna mewujudkan *Good Governance*

- Masih kurangnya pelayanan sarana dan prasarana khususnya di bidang informasi dan teknologi.

Dari uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sangatlah berpengaruh terhadap dampak pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkelanjutan”** yang mana bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil diharapkan selalu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengembangan sistem pengamanan, perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup (maju), mengarah pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia (aman) yang nantinya akan dapat membuahkan pada meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap berbagai regulasi dan aturan hukum tanpa meninggalkan daya kritis dan partisipatif dari masyarakat (tertib). Sehingga secara otomatis visi yang akan dicapai dapat terealisasi sesuai dengan misi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkelanjutan”** sebagai alat untuk mencapai sasaran visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, yaitu :

A. Tugas Sekretariat DPRD

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

B. Fungsi Sekretariat DPRD

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. Penyelenggaraan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rekomendasi dari isu-isu pelayanan teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sistem pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Memberdayakan tenaga pelayanan dan menyediakan tenaga teknis di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan Bimtek Legal Drafting/Diklat-Diklat;
3. Mewujudkan prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan

(lengkap dengan fasilitas dan referensi-referensi atau bahan penyusunan).

C. Permasalahan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- b. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lamongan
(terlampir)

Table 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

NO.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		NIHIL			

2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan akan menambahkan usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan akan tetapi tidak ada usulan dari kelompok masyarakat LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lain-lainnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan belum melaksanakan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

Sekretariat DPRD pada prinsipnya merupakan unsur Staf yang memberikan pelayanan terhadap kelancaran tugas lembaga legislatif daerah. Peran Sekretariat DPRD adalah penunjang pelaksanaan sidang dan rapat-rapat DPRD sehingga untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung staf yang mempunyai skill cukup memadai yang meliputi :

1. Penganggaran, maksudnya Sekretariat DPRD hendaknya mempunyai kemampuan dibidang ekonomi (anggaran), khususnya yang berkaitan dengan pemahaman masalah struktur dan substansi APBD, yang di sesuaikan Peraturan terbaru mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah/Negara;
2. Legislasi, maksudnya Sekretariat DPRD minimal memiliki pengetahuan mengenai di bidang perencanaan undang-undang (legal drafting);
3. Pengawasan, maksudnya adalah bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD itu bersifat politis, misalnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, Perda, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, sehingga diperlukan aparatur Sekretariat DPRD yang mempunyai kemampuan di bidang politik, hukum dan administrasi Negara;

3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemiluakada, Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025- 2029, adalah :

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan"

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Kejayaan Lamongan** adalah Suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai Kabupaten Unggul dan Maju, Sejahtera Lahir Batin, terdepan Dalam Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Jawa Timur.
2. **Berkelanjutan** adalah menegaskan pentingnya kesinambungan yang adil dan merata tanpa mengabaikan lingkungan hidup serta harmoni sosial.

memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”** ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

Misi 1.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Mengoptimalkan Berbagai Potensi Serta Sektor Unggulan, Pengetahuan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, Pengembangan Pariwisata Serta Mendorong Berkembangnya Ekonomi Kreatif (Start Up).

Misi 2.

Mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan adaptif terhadap perubahan zaman, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk Mencetak Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat Jasmani dan Rohani, Produktif, Daya Saing dan Berakhlakul Karimah dalam Rangka Menyambut Revolusi Industri 4.0.

Misi 3.

Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk Membangun infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan.

Misi 4.

Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

Misi 5.

Mewujudkan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif, dengan penjelasan sebagai berikut : Misi ini dimaksudkan untuk Menghadirkan Tata kelola Pemerintah yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Berbasis Digital dan Bebas Korupsi, Dengan Memberikan Ruang yang Luas bagi Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Hingga Evaluasi Kebijakan. Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 – 2029, yaitu :

Tujuan :

- Meningkatnya Kualitas fasilitasi dan tugas dan fungsi DPRD

Sasaran 1 :

- Meningkatnya dukungan sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Sasaran 2 :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik

Indikator Sasaran 1 :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Indikator Sasaran 2 :

- Nilai Sakip Sekretariat DPRD.

Tabel 3.1

**Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan
(terlampir)**

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sejalan dengan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029, maka Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ada 2 Program, 17 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan, Sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

i. Layanan Administrasi DPRD

1. Fasilitas Fraksi DPRD
2. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

2) PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 4. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Pembahasan APBD
 4. Pembahasan APBD Perubahan
 5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 6. Pengawasan Penggunaan Anggaran
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Pendalaman Tugas DPRD
 2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

- 6. Penyusunan Program Kerja DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 2. Pelaksanaan Reses
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 1. Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 2. Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - 1. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah
 - 2. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- h. Fasilitasi Tugas DPRD
 - 1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - 2. Penyusunan laporan Kinerja DPRD
 - 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel 3.1
PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KERJA PD DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2025

Kode Rekening					RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			Pagu	Selisih (Bertambah/Berkurang)	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target dan Satuan	Pagu	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target dan Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	83	42.312.221.976,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	83	38.993.570.878,00	-3.318.651.098,00		SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dok. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	157.988.576,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dok. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	117.720.876,00	-40.267.700,00		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	51.058.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	38.970.800,00	-12.087.600,00		
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 laporan	106.930.176,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 laporan	78.750.076,00	-28.180.100,00		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4.665.028.900,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	3.843.259.400,00	-821.769.500,00		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	4.635.034.100,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	3.821.875.000,00	-813.159.100,00		
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	10.080.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5.851.000,00	-4.229.000,00		
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3.206.300,00	-1.793.700,00		
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	14.914.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	12.327.100,00	-2.587.700,00		
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pakaian dinas dan pelatihan Perangkat Daerah yang tercukupi	100%	621.806.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pakaian dinas dan pelatihan Perangkat Daerah yang tercukupi	100%	292.688.500,00	-329.117.500,00		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	41.768.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00	-41.768.000,00		
4	02	01	2.05	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 orang	580.038.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 orang	292.688.500,00	-287.349.500,00		
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00	0,00		
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	1.227.184.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	1.117.303.300,00	-109.881.300,00		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.259.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	60.259.200,00	0,00		
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.732.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	546.280.500,00	544.548.000,00		
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	104.130.900,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	91.081.300,00	-13.049.600,00		
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	279.999.800,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	200.000.300,00	-79.999.500,00		
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.999.500,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.999.500,00	0,00		
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	46 Laporan	125.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	46 Laporan	46.440.000,00	-78.560.000,00		
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	648.581.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	168.242.500,00	-480.338.500,00		
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.481.700,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	0,00	-2.481.700,00		

4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	907.735.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	270.023.000,00	-637.712.800,00		
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	469.229.700,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	144.281.600,00	-324.948.100,00		
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	438.506.100,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	125.741.400,00	-312.764.700,00		
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Kantor yang tepat waktu	100%	1.707.326.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Kantor yang tepat waktu	100%	1.259.344.500,00	-447.981.500,00		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	24.192.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	14.996.800,00	-9.195.200,00		
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	469.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	593.500.700,00	124.000.700,00		
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.213.634.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	650.847.000,00	-562.787.000,00		
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	958.000.100,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	1.035.813.750,00	77.813.650,00		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	295.265.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	295.265.000,00	0,00		
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	300.989.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	300.989.000,00	0,00		
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	252 unit	108.221.300,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 unit	123.559.750,00	15.338.450,00		
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung/2 paket	253.524.800,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung/2 paket	316.000.000,00	62.475.200,00		
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase Laporan Keuangan DPRD yang tepat waktu	100%	31.281.794.000,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase Laporan Keuangan DPRD yang tepat waktu	100%	30.511.199.552,00	-770.594.448,00		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/12 Bulan	30.835.994.000,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 anggota DPRD/12 bulan	30.088.949.552,00	-747.044.448,00		
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	370.000.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	346.450.000,00	-23.550.000,00		
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	75.800.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 anggota DPRD	75.800.000,00	0,00		
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Presentase Rapat-rapat DPRD yang terpenuhi	100%	785.358.000,00	Layanan Administrasi DPRD	Presentase Rapat-rapat DPRD yang terpenuhi	100%	546.218.000,00	-239.140.000,00		
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-	0,00	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-	0,00	0,00		
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	68 laporan	785.358.000,00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	66 laporan	546.218.000,00	-239.140.000,00		
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	100%	32.809.062.095,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	100%	24.916.474.649,00	-7.892.587.446,00		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	774.999.394,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	357.861.200,00	-417.138.194,00		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	30 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	18 Dokumen	46.261.200,00	-153.738.800,00		
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	199.999.400,00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	61.700.000,00	-138.299.400,00		
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	0,00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	0,00	0,00		
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	349.999.994,00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	249.900.000,00	-100.099.994,00		
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tatib DPRD yang disusun	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tatib DPRD yang disusun	-	0,00	-25.000.000,00		

4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase rapat-rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100%	274.999.600,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase rapat-rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100%	202.248.000,00	-72.751.600,00		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	49.999.800,00	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 dokumen	38.293.500,00	-11.706.300,00		
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	49.999.800,00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5 dokumen	37.904.700,00	-12.095.100,00		
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	18 Dokumen	60.000.000,00	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	38.024.900,00	-21.975.100,00		
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	18 Dokumen	60.000.000,00	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	8 dokumen	38.024.900,00	-21.975.100,00		
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	55.000.000,00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 dokumen	50.000.000,00	-5.000.000,00		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	101.840.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	93.200.000,00	-8.640.000,00		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan komisi Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	10 laporan	25.460.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan komisi Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	10 laporan	22.900.000,00	-2.560.000,00		
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 laporan	25.460.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 laporan	23.700.000,00	-1.760.000,00		
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 laporan	25.460.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 laporan	23.700.000,00	-1.760.000,00		
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 laporan	25.460.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 laporan	22.900.000,00	-2.560.000,00		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	100%	5.102.885.701,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	100%	5.068.107.649,00	-34.778.052,00		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	23 Dokumen	3.728.412.601,00	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	35 dokumen	3.619.549.249,00	-108.863.352,00		
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	100.000.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	100.000.000,00	0,00		
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	252.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	252.000.000,00	0,00		
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25 Dokumen	74.999.100,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	22 dokumen	112.195.800,00	37.196.700,00		
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	60.000.000,00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	57.051.500,00	-2.948.500,00		
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	30 Dokumen	887.474.000,00	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 dokumen	927.311.100,00	39.837.100,00		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan	100%	522.999.800,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan	100%	447.355.000,00	-75.644.800,00		
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	9.500.000,00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 dokumen	2.500.000,00	-7.000.000,00		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	513.499.800,00	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	444.855.000,00	-68.644.800,00		
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Presentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	100%	63.889.100,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Presentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	100%	13.889.100,00	-50.000.000,00		
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	0,00	-50.000.000,00		
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	13.889.100,00	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 laporan	13.889.100,00	0,00		
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Presentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100%	223.079.500,00	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Presentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100%	51.302.100,00	-171.777.400,00		
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen	223.079.500,00	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 dokumen	51.302.100,00	-171.777.400,00		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase Fasilitasi Tugas DPRD dilaksanakan	100%	25.744.369.000,00	Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase Fasilitasi Tugas DPRD dilaksanakan	100%	18.682.511.600,00	-7.061.857.400,00		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	34 Dokumen	22.579.369.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	54 dokumen	15.714.035.500,00	-6.865.333.500,00		

4	02	02	2.08	02	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	65.000.000,00	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	61.865.000,00	-3.135.000,00		
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	26 Dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	26 dokumen	56.611.100,00	-43.388.900,00		
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	29 Dokumen	3.000.000.000,00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	61 dokumen	2.850.000.000,00	-150.000.000,00		
J U M L A H								75.121.284.071,00				63.910.045.527,00	-11.211.238.544,00		

Lamongan, Juni 2025

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LAMONGAN

PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19691008 199503 1 003

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran P-APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2025, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah direncanakan yaitu penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan visi dan misi Kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan dengan baik.

4.2 Catatan Penting dalam Pelaksanaannya

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang diterapkan dalam Perubahan RENJA tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip

seperti efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dan program dalam satu instansi pemerintahan atau antar instansi pemerintahan harus mensinkronisasikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai berikut :

1. RENJA Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan-kegiatan yang didasari oleh RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan.
2. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus berpedoman pada dokumen perencanaan diantaranya RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, RKPD dan Renstra OPD.
3. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD merupakan dasar bagi pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

4.4 Rencana Tindak Lanjut

1. Sehubungan dengan peningkatan kapasitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, maka pemerintah mengupayakannya melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis, workshop dan seminar-seminar mengenai perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses perencanaan maupun penganggaran (Musrenbang).

3. Dokumen perencanaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyusun dokumen perencanaan Perubahan (RENJA) tepat waktu dan sesuai dengan jadwal.

Lamongan, Juni 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN



PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19691008 199503 1 003